

# IMPLEMENTASI KEBIJAKAN VAKSINASI COVID-19 DI KOTA PEKANBARU TAHUN 2021

Oleh: Dwi Rahayu Ningsih

Email: [dwi943559@gmail.com](mailto:dwi943559@gmail.com)

Dosen Pembimbing: Adlin, S.Sos., M.Si.

Email : [adlinoke@gmail.com](mailto:adlinoke@gmail.com)

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

## ABSTRACT

*The implementation of vaccination in Pekanbaru City in 2021 is considered not going well, because there are problems related to the implementation of the Covid-19 Vaccination implementation policy in Pekanbaru City. This study aims to determine and analyze the implementation of Pekanbaru City Government policies in the implementation of Covid-19 Vaccination and the inhibiting factors in implementing vaccination policies for the community in Pekanbaru City in 2021. This study uses policy implementation theory by looking at the elements, namely: 1) tractability of the problem, 2) ability of policy decision to structure implementation 3) nonstatory variable affecting implementation. This research method uses descriptive qualitative methods. While the author's data sources use interview and documentation techniques. The location of this research is in Pekanbaru City.*

*The results of this study indicate that the implementation of the vaccination policy in Pekanbaru City is based on the Presidential Regulation number 99 in 2020 and the Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia number 10 in 2021, which is related to the technical implementation and vaccination process. Meanwhile, the Pekanbaru City Government in implementing the vaccination policy can form a Mayor's Decree related to the task force for the acceleration of vaccination in Pekanbaru City. The implementation of community vaccination in Pekanbaru City involves all parties, including the Mayor of Pekanbaru, Regional Apparatuses, Regional Hospitals and Private Hospitals. The implementation of vaccination in Pekanbaru City achieve the 70% target by 2021. In addition, the impact of the vaccination policy in Pekanbaru City has an effect on the activities of the people of Pekanbaru City which are starting to improve. The inhibiting factors from the implementation of vaccination policies in Pekanbaru City are the limited dose of vaccine from the center, the lack of communication between the Pekanbaru City Government and the Riau Provincial Government regarding community vaccination data that is out of sync and the public understanding of Pekanbaru City is still negative about the impact of the vaccine.*

**Keywords:** *Tractability problem, policy decision, variable affecting*

## **PENDAHULUAN**

Sejak WHO (*World Health Organization*) melaporkan kasus pertama di Cina. Kemudian selanjutnya, telah ditemukan kasus tersebut merupakan jenis baru dari corona virus. Pasca ditetapkannya COVID-19 sebagai pandemi global yang mempengaruhi aspek kesehatan masyarakat, ternyata juga berpengaruh dan meluas ke aspek-aspek lain. Di Indonesia sendiri kemudian berdampak pada aspek pemerintahan, yakni hubungan pusat dan daerah atas penanggulangan COVID-19 dalam konteks aspek layanan medis yang diberikan kewenangan penyelenggaraannya di daerah. Presiden Joko Widodo melalui Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), menetapkan status kedaruratan kesehatan, diikuti dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 ( Covid -19).

Pada tahun 2021 jumlah kasus Covid di Indonesia mencapai 3.033.339. Melonjaknya jumlah kasus covid Pemerintah pusat membuat peraturan tentang pencegahan penyebaran covid dengan mengadakan vaksinasi. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Provinsi Riau merupakan Provinsi di pulau sumatera yang memiliki kasus penyebaran virus Corona dan kota yang paling tinggi memiliki kasus penyebaran Virus Corona yaitu Kota Pekanbaru, Pelaksanaan Vaksinasi di Kota Pekanbaru belum berjalan dengan baik, dikarenakan ada masalah- masalah yang timbul terkait dalam implementasi kebijakan pelaksanaan vaksinasi covid-19 di wilayah Kota Pekanbaru, dan minimnya komunikasi Pemerintah Kota Pekanbaru dengan pihak atau instansi yang terlibat dalam pelaksanaan penyaluran vaksin covid-19, dan kurang tegasnya dalam pelaksanaan kebijakan mengenai proses administrasi sehingga timbul permasalahan sosial seperti berkerumunan.

## **RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan permasalahan di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam pelaksanaan Vaksinasi kepada masyarakat di Kota Pekanbaru tahun 2021 ?
2. Apakah yang menjadi kendala dan hambatan dalam Implementasi Kebijakan Pelaksanaan Vaksinasi kepada masyarakat di Kota Pekanbaru tahun 2021 ?

## **KERANGKA TEORI**

### **1. Implementasi Kebijakan**

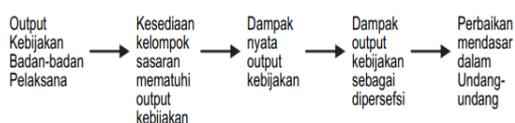
Implementasi dari setiap kebijakan merupakan suatu proses yang dinamis dan mencakup banyak interaksi dari berbagai variabel. Hal ini penting untuk dianalisis guna mengetahui prakondisi-prakondisi yang diperlukan sehingga implementasi berhasil, serta untuk mengetahui hambatan-hambatan utama yang mengakibatkan implementasi gagal. Implementasi kebijakan akan lebih mudah dipahami

apabila menggunakan suatu model atau kerangka pemikiran tertentu, suatu model akan memberikan gambaran secara lengkap mengenai suatu obyek, situasi atau proses tersebut serta bagaimana korelasi antara komponen-komponen tersebut.

Namun demikian, Menurut Mazmanian dan Paul A Sabatier dalam menilai suatu implementasi kebijakan ada 3 (tiga) sudut pandang yang digunakan yakni:

- 1) Mudah Tidaknya masalah yang akan digarap atau dikendalikan (*Tractibility of the problems*)
- 2) Kemampuan keputusan kebijakan yang menstrukturkan secara tepat proses implementasinya (*ability of policy decision to structure implementation*)
- 3) Pengaruh langsung berbagai variable yang termuat dalam keputusan kebijakan (*Nonstatory variable affecting implementation*)

Selanjutnya Sabatier dan Mazmanian mengenai Langkah dan proses implementasi sebagai variable yang dipengaruhi terdiri dari



menganggap bahwa: “suatu implementasi akan efektif jika birokrasi pelaksananya mematuhi apa yang telah digariskan oleh peraturan (petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis). Oleh karena itu model ini disebut sebagai model *top down*”. Berikut beberapa tahap pendekatan model *top down*:

Deskripsi	<i>Top-down</i>
Fokus awal	Kebijakan pemerintah (pusat)
Identifikasi aktor utama yang terlibat dalam proses	Dari pusat (atas) dilanjutkan ke bawah Sebagai konsekuensi implementasi

Kriteria evaluasi	Berfokus pada pencapaian tujuan formal yang dinyatakan dalam dokumen kebijakan
Fokus secara keseluruhan	Bagaimana mekanisme implementasi bekerja untuk mencapai tujuan kebijakan

Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atas tujuan yang diinginkan. Kebijakan publik dapat berbentuk kebijakan pemerintahan misalnya kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan dari pemerintah pusat, keputusan dan peraturan daerah yang dikeluarkan oleh Gubernur, Bupati atau Walikota. Pengertian tersebut didukung oleh pendapat Mazmanian dan sabatier yang menyatakan bahwa: “Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, yang biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif legislatif yang penting atau keputusan badan peradilan”. Menurut Mazmanian dan Sabatier (dalam Tachjan, 2006:59).

Implementasi kebijakan / kebijaksanaan dapat juga dikatakan implementasi pembangunan atau implementasi program pembangunan. Implementasi Kebijakan Secara etimologis pengertian implementasi menurut Kamus Webster yang dikutip oleh Solichin Abdul Wahab adalah “*to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); dan *to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu)”. Sementara Donald S. Van Metter dan Carl E. Va dalam (Widodo, 2010) memberikan pengertian implementasi dengan mengatakan: “*Policy implementation encompasses those action by public and private individual (or group) that are directed at the*

*achievement of objectives set forth in prior policy decision. This include both one time efforts to transfrom" decisions into operational terms, as well as continuing efforts to achieve the large and small changes mandated by policy decision."* Perhatian utama pembuat kebijakan menurut Wahab memfokuskan diri pada "sejauh mana kebijakan tersebut telah tercapai dan apa alasan yang menyebabkan keberhasilan atau kegagalan kebijakan tersebut". Dari sudut pandang implementor, menurut Wahab implementasi akan terfokus pada "tindakan pejabat dan instansi di lapangan untuk mencapai keberhasilan program". Sementara dari sudut pandang *target groups*, menurut Wahab implementasi akan lebih dipusatkan pada "apakah implementasi kebijakan tersebut benar-benar mengubah pola hidupnya dan berdampak positif panjang bagi peningkatan mutu hidup termasuk pendapatan mereka". Menurut pandangan Ripley dalam Subarsono, bahwa tahapan kebijakan publik terdiri dari:

1. Penyusunan agenda kebijakan,
2. Formulasi dan legitimasi kebijakan,
3. Implementasi kebijakan dan
4. Evaluasi terhadap implementasi, kinerja, & dampak.

Dalam tahap penyusunan agenda kebijakan, menurut Ripley menyatakan bahwa terdapat tiga kegiatan yang perlu dilakukan yaitu:

1. Membangun persepsi di kalangan stake holder bahwa sebuah fenomena benar- benar dianggap masalah
2. Membuat batasan masalah dan
3. Memobilisasi dukungan agar masalah tersebut bisa masuk dalam agenda pemerintah.

Menurut George Edward III yang dikutip dalam (Agustino, 2016) terdapat 4 faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan

implementasi kebijakan antara lain yaitu faktor :

- a) Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.
- b) Sumberdaya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif.
- c) Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.
- d) Struktur birokrasi, struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah *Standard Operating Procedure* (SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Jadi implementasi kebijakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh berbagai aktor kebijakan dengan sarana-sarana pendukung berdasarkan aturan-aturan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

## 2. Kebijakan Vaksinasi

Vaksinasi atau yang disebut dengan vaksin terkait pencegahan dan penanganan dari Covid-19 adalah suatu tindakan medis di bidang kesehatan yang bertujuan untuk memberikan sistem kekebalan tubuh agar tubuh manusia tidak mudah terserang virus. Vaksinasi atau imunisasi bertujuan untuk membuat sistem kekebalan tubuh seseorang untuk cepat melawan bakteri ataupun yang dimaksud dengan virus covid-19 yang menyebabkan infeksi pada tubuh seseorang (Sampang, 2021). Pemerintah Indonesia telah menetapkan bahwa Covid-19 merupakan bencana non-alam tidak hanya di Indonesia tapi diseluruh dunia, sehingga perlu adanya intervensi efektif dari negara salah satunya dengan pengadaan vaksinasi.

Terkait dengan kebijakan vaksinasi covid-19 di Indonesia diawali dengan Intruksi Presiden Republik Indonesia bahwa:

- 1) Vaksinasi diberikan secara gratis kepada masyarakat,
- 2) Memprioritaskan dan mengalokasikan anggaran terkait ketersediaan vaksinasi,
- 3) Seluruh jajaran kabinet, Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah agar memprioritaskan program vaksinasi pada anggaran tahun 2021 (Nadia, 2021).

Kebijakan vaksinasi yang ditetapkan oleh Pemerintah bertujuan untuk menurunkan angka penularan covid- 19, mengurangi angka kematian atau kesakitan yang disebabkan karena coronavirus, tercapainya kekebalan imun

masyarakat kelompok (*herd immunity*), menghindari dan menjaga masyarakat sehat, meningkatkan sistem kesehatan secara menyeluruh, serta menjaga dan meminimalisir dampak sosial dan ekonomi (Nurlailah, 2021). Terkait kebijakan vaksinasi, dikutip dari (RB M. Akbar T. A. P., 2021) menjelaskan bahwa Pemerintah membagi menjadi 6 kelompok sasaran bagi penerima vaksinasi Covid-19 antara lain yaitu:

1. Tenaga medis, TNI atau Polisi, aparat hukum serta pelayanan publik;
2. Tokoh spiritual atau masyarakat dan perangkat daerah;
3. Tokoh atau tenaga pendidik;
4. Aparatur pemerintah mulai dari pusat, daerah, dan legislative,
5. Penerima bantuan iuran BPJS kesehatan; dan
6. Masyarakat berusia 19-59 tahun.

Kebijakan program vaksinasi di tujukan membentuk kekebalan tubuh bagi seseorang sehingga tidak terinfeksi atau terpapar oleh penyebaran covid-19, Pemerintah membentuk kebijakan terkait program vaksinasi dengan melibatkan seluruh jajaran yang telah ditetapkan dalam Peraturan Perundang-Undangan yang telah ditetapkan terkait vaksinasi di Indonesia.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, disebut juga dengan metode kualitatif karena data kualitatif merupakan sumber dari deskripsi yang luas dan berlandaskan kukuh, serta memuat penjelasan tentang proses-proses yang terjadi dalam lingkup setempat. Dengan data kualitatif kita dapat mengikuti dan memahami alur peristiwa secara kronologis, menilai sebab akibat dalam lingkup pikiran orang-orang setempat, dan memperoleh penjelasan yang banyak dan bermanfaat, dan data kualitatif lebih condong

membimbing kita untuk memperoleh penemuan- penemuan yang tak diduga sebelumnya dan untuk membentuk kerangka teoritis baru (Silalahi, 2010). diungkapkan dalam bentuk kata serta uraian-uraian bahkan dapat berupa cerita. Data kualitatif bersifat subjektif, sehingga peneliti yang menggunakan data penelitian kualitatif harus sedapat mungkin untuk menghindari sifat subjektif yang dapat mengaburkan objektifitas data penelitian.

Lokasi penelitian yaitu Kota Pekanbaru, alasan peneliti menetapkan Kota Pekanbaru sekaligus objek penelitian karena berdasarkan permasalahan Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota terhadap pelaksanaan vaksinasi. Dan alasan peneliti memilih kota pekanbaru karena pada saat ini terjadi permasalahan Karena meningkatnya jumlah orang yang terdampak Covid-19 hal ini menyebabkan vaksin menipis, layanan bus dihentikan sementara dan adanya penarikan kembali Vaksin dari beberapa rumah sakit di Kota Pekanbaru.

## PEMBAHASAN

Pembahasan dalam penelitian ini didukung oleh teori implementasi kebijakan yang di kemukakan oleh Teori Mazmanian dan Sabatier yang dalam (Tachjan, 2006:57) dalam menilai suatu implementasi kebijakan ada 3 (tiga) sudut pandang yang digunakan yakni:

1. Mudah tidaknya masalah yang akan dikendalikan (*Tractibility of the problems*)

Pada tahap ini memfokuskan masalah apa yang terjadi dan cara mengendalikan dengan melihat permasalahan teknis, keberagaman, kelompok sasaran hingga pada ruang lingkup perubahan yang terjadi yang dilakukan oleh pejabat-pejabat atau lembaga di tingkat pusat untuk mendapatkan kepatuhan dari pejabat

atau lembaga di tingkat yang lebih rendah. Keberlangsungan pelaksanaan vaksinasi Pemerintah Pusat dalam hal ini melalui Menteri Kesehatan secara teknis mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/4638/2021 terkait Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Percepatan dan Penanggulangan Covid-19. Percepatan program vaksinasi dapat dilaksanakan pada tingkat Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota dengan melalui tahapan proses yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, Kepala Sub Bagian Program , Bapak Riko menjelaskan bahwa:

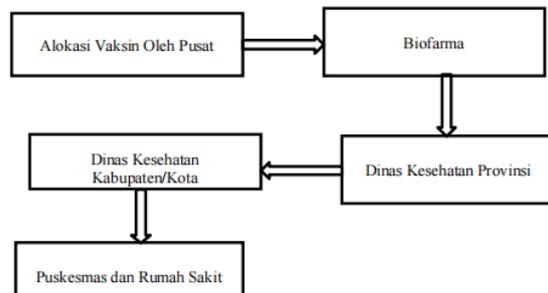
*“Pelaksanaan Vaksinasi merupakan program Pemerintah Pusat, maka pelaksanaan vaksinasi di Kota Pekanbaru dan di seluruh daerah sesuai dengan petunjuk teknis dari Pemerintah Pusat, atau Menteri Kesehatan, mulai dari prosesnya sampai vaksinasi dilaksanakan”.*(wawancara,27 Januari 2022).

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa untuk pelaksanaan vaksinasi di Kota Pekanbaru untuk kebijakan merujuk pada teknis yang ditentukan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Selanjutnya untuk proses administrasi juga ditentukan oleh Pemerintah Pusat mulai dari proses penerimaan vaksinasi sampai pada tahap pelaksanaan vaksinasi.

Pelaksanaan vaksinasi di Kota Pekanbaru didasarkan pada Kebijakan Pemerintah Pusat atau yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat melalui Peraturan Menteri Kesehatan atau Keputusan lainnya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat. Kebijakan vaksinasi didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan vaksin dan

pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Berikut alur proses distribusi vaksinasi:

Bagan 3.1 Alur Proses Distribusi Vaksinasi



Sumber: Paparan Rakernassus Kementerian Kesehatan RI.2021

Berdasarkan bagan 3.1 di atas terkait alur proses distribusi vaksinasi merupakan salah satu proses administrasi dalam pelaksanaan vaksinasi masyarakat di Kota Pekanbaru. Alokasi dan distribusi dosis vaksin di tingkat Kota Pekanbaru harus melalui persetujuan Pemerintah Pusat dan keputusan dari Pemerintah Pusat dalam penyediaan vaksinasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, Kepala Sub Bagian Program, Bapak Riko menjelaskan bahwa:

*“ proses penerimaan dosis vaksinasi tentu Pemerintah Kota Pekanbaru harus melalui prosedur yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan yaitu dari Pemerintah Pusat, pemberian dosis vaksin dari pusat kadang terbatas untuk daerah-daerah tertentu, dan harus menunggu Pemerintah Pusat”.*(wawancara,27 Januari 2022)

Berdasarkan hasil wawancara di atas bersama Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru bahwa untuk proses penerimaan vaksin dari Pemerintah Pusat melalui prosedur yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Asisten I Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru Bagian Analisis Peraturan Perundangan, Bapak

Isharawana menjelaskan bahwa:

*“Pelaksanaan vaksinasi atau Kebijakan terkait Vaksinasi di Kota Pekanbaru itu tidak terdapat Perda (Peraturan Daerah), karena kebijakan vaksinasi itu dasarnya dari Pemerintah Pusat, namun untuk teknis kita dapat membentui Perwako atau Keputusan Walikota untuk membentuk tim percepatan vaksinasi di Kota Pekanbaru”.*(Wawancara,14 Januari 2022)

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Sekretariat Kota Pekanbaru bahwa dalam pelaksanaan vaksinasi secara teknis diatur dalam Peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Sedangkan untuk teknis pelaksanaan Walikota Pekanbaru dapat membentuk satuan tugas untuk percepatan vaksinasi masyarakat di Kota Pekanbaru. Selain itu, dalam surat keputusan tersebut bahwa dalam mendukung pelaksanaan vaksinasi di Kota Pekanbaru terdapat dukungan yang bersumber dari APBD melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing perangkat daerah Kota Pekanbaru.

Selain itu, untuk mendukung percepatan vaksinasi di Kota Pekanbaru juga melibatkan Perangkat Daerah atau Unit Perangkat Daerah yang membidangi Kesehatan/Unit Kesehatan yaitu Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru yang bertanggung jawab atas pelaksanaan vaksinasi di Kota Pekanbaru.

2. Kemampuan keputusan kebijakan untuk menstrukturkan secara tepat proses implementasinya (*Ability of policy decision to structure implementation*)

Tahap ini memfokuskan pada kemampuan kebijakan untuk menstrukturkan proses implementasi dengan melihat kejelasan, ketepatan, keterpaduan yang di lakukan oleh pejabat dan instansi-instansi di lapangan dalam upaya untuk menanggulangi

masalah yang terjadi. Dengan tingginya angka Covid di Indonesia terutama di Kota Pekanbaru maka diterapkannya program vaksinasi. Implementasi kebijakan vaksinasi masyarakat di Kota Pekanbaru belum menimbulkan dampak negatif yang membahayakan masyarakat Kota Pekanbaru. Dampak yang ditimbulkan dari implementasi kebijakan vaksinasi dapat dilihat melalui manfaat dari vaksinasi itu sendiri yaitu merangsang kekebalan tubuh terhadap Covid-19, mengurangi resiko penularan, melindungi orang sekitar yang tidak dapat diberikan vaksinasi dan mencapai *Herd Immunity* (Imunitas Kelompok) dan kekebalan tubuh. Berdasarkan wawancara yang dilakukan bersama pihak Asisten I Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru Bagian Analisis Peraturan Perundangan, Bapak Isharawana menjelaskan bahwa:

*“Seluruh Perangkat Daerah Kota Pekanbaru mendukung pelaksanaan vaksinasi di Kota Pekanbaru dengan berkomitmen mencapai target yang ditentukan selain itu membentuk satuan tugas percepatan vaksinasi, selain itu seluruh pihak terlibat dalam pelaksanaan percepatan vaksinasi”.*(Wawancara, 14 Januari 2022)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa seluruh pihak Organisasi Perangkat Daerah Kota Pekanbaru terlibat dalam percepatan vaksinasi di Kota Pekanbaru dan mendukung program Pemerintah untuk program vaksinasi dengan melihat angka target yang mencapai diatas rata-rata target.

Keputusan Walikota Pekanbaru terkait pembentukan Tim Percepatan Vaksinasi di Kota Pekanbaru, bahwa pelaksanaan kebijakan vaksinasi masyarakat di Kota Pekanbaru dilimpahkan kepada Walikota sebagai Kepala Daerah Kota Pekanbaru dan dibantu oleh Organisasi Perangkat

Daerah yang membidangi masing-masing tugas pokok dan fungsi, maka untuk itu dibentuklah satuan tugas yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan vaksinasi di Kota Pekanbaru.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Rumah Sakit Daerah Madani, Kepala Seksi Pelayanan Medik, Dr.Lusiana menjelaskan bahwa:

*“Pendataan secara langsung terhadap dampak setelah vaksin dan sebelum vaksin belum dapat dipastikan, akan tetapi dampak dari vaksinasi terhadap imunitas seseorang sangat bermanfaat untuk kekebalan tumbuh agar terhindar dari penularan Covid-19,”*(wawancara, 27 Januari 2022)

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa salah satu dampak dari adanya vaksinasi yaitu membentuk kekebalan tubuh masyarakat Kota Pekanbaru agar angka penyebaran covid-19 di Kota Pekanbaru dapat ditekan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Asisten I Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru Bagian Analisis Peraturan Perundangan, Bapak Isharawana menjelaskan bahwa:

*“Dampak dari adanya kebijakan vaksinasi di Kota Pekanbaru dapat dilihat dari masyarakat sudah mulai bebas beraktivitas, walaupun masih harus mengikuti protokol kesehatan dan salah satunya menunjukkan sertifikat vaksinasi atau melalui website atau aplikasi pedulilindungi, jadi vaksinasi berdampak pada imunitas masyarakat Kota Pekanbaru sehingga kegiatan atau aktivitas masyarakat di Kota Pekanbaru sudah dapat berjalan kembali”.*(wawancara 14 Januari 2022)

Selain dampak dari kebijakan vaksinasi, masyarakat Kota Pekanbaru setelah divaksin tidak lagi dibatasi sepenuhnya 100% akan tetapi, 50% dengan tetap mengikuti protokol

kesehatan. Dengan dilaksanakannya kebijakan vaksinasi maka kegiatan masyarakat di Kota Pekanbaru dapat berjalan dengan semestinya dengan tetap mematuhi protokol kesehatan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Satuan Tugas Vaksinasi, Bagian Wakil Koordinator Sekretariat, Bapak Yunaldi menjelaskan bahwa:

*“Dengan adanya kebijakan vaksinasi dan pelaksanaan vaksinasi di Kota Pekanbaru jumlah angka masyarakat yang terdampak covid-19 berkurang dan sangat baik dari yang dirasakan sebelumnya.”(wawancara, 27 Januari 2022)*

Pelaksanaan kebijakan vaksinasi masyarakat di Kota Pekanbaru telah mencapai target yang diharapkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru, bahkan di atas rata-rata ditingkat daerah kabupaten/kota di Provinsi Riau. Bahwa kewenangan pelaksanaan vaksinasi di Kota Pekanbaru diberikan kepada Walikota Pekanbaru sebagai Kepala Daerah Kota Pekanbaru yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan vaksinasi baik dari segi dukungan kebijakan pelaksanaan vaksinasi tingkat daerah Kota Pekanbaru dengan dikeluarkannya surat keputusan terkait pembentukan satuan tugas yang melaksanakan vaksinasi tingkat daerah Kota Pekanbaru. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Asisten I Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru Bagian Analisis Peraturan Perundangan, Bapak Isharawana menjelaskan bahwa:

*“Untuk pelaksanaan vaksinasi di Kota Pekanbaru itu yang memiliki tanggung jawab adalah Kepala Dearah yaitu Walikota Pekanbaru, dan untuk pelaksanaannya dibantu oleh perangkat daerah dalam hal ini yang paling banyak terlibat Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru”.*(Wawancara 14 Januari, 2022)

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, Kepala Sub Bagian Program, Bapak Riko menjelaskan bahwa:

*“Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru bertanggung jawab dalam pelaksanaan vaksinasi terutama penyediaan dosis vaksinasi, karena Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru terdiri dari Aparatur Pemerintah dan Tenaga Kesehatan, jadi Dinas Kesehatan sebagai koordinator pelayanan kesehatan yang bertanggung jawab atas ketersediaan tenaga kesehatan, dosis vaksin dan penentuan pelaksanaannya vaksinasi”.*(wawancara 25 Januari 2022)

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru memiliki tanggung jawab dalam ketersediaan tenaga kesehatan, dosis vaksinasi, dan jadwal.

### 3. Pengaruh langsung berbagai variable yang termuat dalam keputusan kebijakan (*Nonstatory variable affecting implementation*)

Pada tahap ini memfokuskan variable yang diluar kebijakan mampu mempengaruhi proses implementasi seperti sasaran dan juga pihak yang akan menikmati dan memanfaatkan hasil-hasil implementasi suatu program. Dengan kata lain implementasi suatu program akan berhasil apabila mampu berpengaruh untuk orang banyak terutama pada sasaran yang dituju dan di sisi lain ada kesesuaian antara hasil (output) program dengan kebutuhan penerima bantuan, sehingga program tersebut dapat dimanfaatkan. Sebaliknya bila hasil program tersebut tidak sesuai dengan apa yang oleh kelompok sasaran, maka program tersebut tidak dapat dimanfaatkan dengan baik sehingga program tersebut tidak akan berhasil.

Penyelenggaraan kebijakan vaksinasi masyarakat di Kota Pekanbaru tidak akan berjalan sesuai dengan target

jika tidak melibatkan seluruh pihak, mulai dari pihak Pemerintah Kota Pekanbaru, Rumah Sakit, Swasta dan Masyarakat Kota Pekanbaru. Untuk mendukung kebijakan Pemerintah Pusat terkait program vaksinasi maka seluruh pihak harus mematuhi kebijakan yang telah di tetapkan oleh Pemerintah Pusat agar melaksanakan vaksinasi untuk memutus mata rantai penularan Covid-19 dan meningkatkan imunitas daya tahan tubuh.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Satuan Tugas Vaksinasi, Bagian Wakil Koordinator Sekretarian, Bapak Yunaldi menjelaskan bahwa:

*“Kepatuhan masyarakat Kota Pekanbaru terhadap program Pemerintah terkait vaksinasi sangat baik dengan capaian vaksinasi yang telah kita lakukan hampir 100%, karena juga Pemerintah Kota Pekanbaru juga menargetkan vaksinasi ini dan Pemerintah juga sangat mendukung program vaksinasi ini dengan melakukan vaksinasi di tempat-tempat mal Pekanbaru, Puskesmas, Rumah Sakit, Tempat Umum dan Mobil Transmetro”.* (wawancara, 27 Januari 2022).

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak satuan tugas vaksinasi diatas bahwa tingkat kepatuhan masyarakat di Kota Pekanbaru sangat baik dengan tingkat partisipasi masyarakat Kota Pekanbaru yang mencapai target dan upaya dukungan dari Pemerintah Kota Pekanbaru dengan melaksanakan vaksinasi ditempat-tempat umum dan fasilitas kesehatan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, Kepala Sub Bagian Program, Bapak Riko menjelaskan bahwa: *“kebijakan vaksinasi bukan hanya diperuntukkan untuk masyarakat Kota Pekanbaru saja akan tetapi, vaksinasi juga diperuntukkan bagi Sumber Daya*

*Manusia Kesehatan, Pelayanan Umum/publik dan Masyarakat Umum (remaja, lansia dan anak-anak)”.* (wawancara 27 Januari, 2022).

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru di atas bahwa Kebijakan vaksinasi bukan hanya ditujukan untuk masyarakat Kota Pekanbaru saja, melainkan kebijakan dari Pemerintah Pusat secara nasional bahwa vaksinasi juga diterapkan pada beberapa pihak yang dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 3.2 Jumlah Sasaran yang Telah di Vaksin di Kota Pekanbaru

No	Kelompok Sasaran	Jumlah Vaksin	
		1	2
1	Tenaga Kesehatan	82%	80%
2	Pelayanan Publik /ASN	98,57%	98%
3	Masyarakat Umum	99,9%	78%
4	Lansia	60,7%	49%
5	Remaja	97%	75,8%

Sumber Data: Olahan Penulis, 2022

Berdasarkan tabel 3.2 yang merupakan data jumlah sasaran yang telah di vaksin di Kota Pekanbaru yang diperoleh dari media Pemerintah Kota Pekanbaru bahwa untuk tenaga kesehatan telah dilakukan suntik vaksinasi 9.000 tenaga kesehatan dari 11.260 orang atau lebih 12.000 tenaga kesehatan di Kota Pekanbaru terhitung pada bulan Februari 2021 (Kominfo.pekanbaru.go.id, 2021). Kemudian pada dosis ke dua untuk tenaga kesehatan telah dilaksanakan vaksinasi dengan target sasaran 80%.

Pelaksanaan vaksinasi menargetkan kelompok sasaran yaitu pelayanan publik atau aparatur sipil negara di Kota Pekanbaru. (Gunawan, <https://m.bisnis.com/>, 2021). Kemudian selanjutnya untuk pelaksanaan vaksinasi pada kelompok sasaran masyarakat umum jauh

mencapai target rata-rata, (Kominfo.Pekanbaru.go.id, 2022) Tingkat kepatuhan atas kebijakan vaksinasi di Kota Pekanbaru dapat dilihat dari upaya Pemerintah Kota Pekanbaru dalam pelaksanaan vaksinasi dan target yang telah dicapai oleh Pemerintah Kota Pekanbaru.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Informan 1 Mahasiswa Universitas Riau dengan dinda Wulan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan menjelaskan bahwa :

*“Hal yang mendorong saya untuk melakukan vaksin di Zaman Pandemic seperti sekarang ini, Selain untuk menjaga kekebalan tubuh dan Imunitas, juga dapat mempermudah saya dalam beraktivitas seperti saat ingin memasuki beberapa tempat yang mengharuskan untuk vaksin seperti mall, bioskop, rumah sakit, Kampus, dll. Pelayanan yang saya dapatkan saat melakukan vaksinasi di RSD Madani cukup baik disediakan ruang tunggu yang diberikan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru dengan Pihak RSD Madani”.*

Berdasarkan hasil wawancara dengan Informan 2 Mahasiswa Universitas Riau dengan dinda Nurhayati Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik menjelaskan bahwa :

*“Saya melakukan vaksin karena mengantisipasi diri sendiri dari bahaya virus covid-19, selain itu zaman covid ini juga mengharuskan kita untuk memakai sertifikat vaksin dalam mengurus berbagai hal sehingga hal itu yang mendorong saya untuk melakukan vaksin. Namun, untuk pelayanan vaksinasi di RSD Madani ini masih kurang baik, karena pelaksanaannya masih dilakukan dengan berdesakan, padahal anjuran dari prokes kita harus menjaga jarak untuk mengurangi penyebaran virus Covid-19 ini”.*

Berdasarkan hasil wawancara dari kedua informan mahasiswa di atas, dapat

ditarik kesimpulan bahwa rata-rata masyarakat patuh terhadap kebijakan vaksinasi covid-19 ini didasarkan pada tuntutan penggunaan sertifikat vaksin di berbagai urusan yang nantinya akan memudahkan masyarakat tersebut. Selain itu, berdasarkan wawancara dengan informan 1 Masyarakat dengan Bapak Arifin, menjelaskan bahwa :

*“ Saya melakukan vaksin untuk berbagai keperluan, salah satunya keperluan anak sekolah, banyak urusan anak sekolah yang membutuhkan sertifikat vaksin ini, untuk pelayanan vaksinasi sendiri saya rasakan cukup baik walaupun masih berdesakan, output setelah dilakukan vaksin menurut saya tidak ada perubahan di dalam tubuh saya.”*

Berdasarkan wawancara dengan informan 2 Masyarakat dengan Ibu Anne Khairani yang berprofesi sebagai pegawai dinas pariwisata, beliau menjelaskan bahwa :

*“ Pelaksanaan vaksin memang harus dilakukan karna kebijakan dari pemerintah juga mewajibkan. Alasan saya melakukan vaksin agar menambah antibodi saya dari serangan virus covid-19, selain itu, saya kan juga bekerja di dinas pariwisata pasti banyak melakukan tugas ke luar kota, sehingga sangat membutuhkan sertifikat vaksin ini untuk berpergian, untuk pelayanan saat melakukan vaksinasi sendiri menurut saya cukup baik, fasilitas dan pelayanannya juga cukup baik. Output setelah melakukan vaksinasi ini saya lebih sering mengantuk dan sering lapar.”*

Berdasarkan hasil wawancara dari kedua informan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa masyarakat belum mengetahui adanya kebijakan Pemerintah mengenai pelaksanaan vaksin ini. Namun, sebagian besar masyarakat telah patuh untuk melaksanakan vaksinasi tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara

dengan pihak Satuan Tugas Vaksinasi, Bagian Wakil Koordinator Sekretariat, Bapak Yunaldi menjelaskan bahwa:

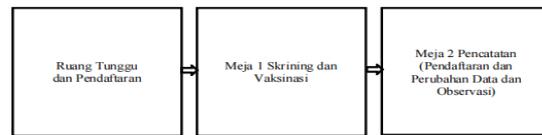
*“untuk kelemahan pelaksanaan vaksinasi di Kota Pekanbaru pada saat ini memang pada tingkat masyarakat lansia atau sebagian masyarakat berfikir bahwa vaksinasi berbahaya dan menyebabkan meninggal akibat berita dari media yang tidak bertanggung jawab kemudian dipihak lansia yang harus dibujuk dan di jemput karena keterbatasan untuk menuju fasilitas kesehatan untuk vaksinasi”.*(wawancara 27 Januari 2022)

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa terdapat permasalahan terhadap kepatuhan masyarakat dalam pelaksanaan vaksinasi di Kota Pekanbaru yaitu keterbatasan dari lansia untuk akses vaksinasi melalui fasilitas kesehatan vaksinasi dan pemahaman masyarakat terhadap dampak vaksin yang berbahaya melalui berita yang tidak bertanggung jawab.

Oleh sebab itu, kepatuhan atas pelaksanaan kebijakan vaksinasi di Kota Pekanbaru masih memiliki kelemahan dan hambatan pada pemahaman beberapa masyarakat di Kota Pekanbaru yang tidak ingin melaksanakan vaksinasi. Sebagian masyarakat Kota Pekanbaru takut dengan vaksinasi yang akan berdampak pada kematian dan penyakit lainnya. Kemudian hambatan lainnya Pemerintah Kota Pekanbaru kesulitan dalam memobilisasi masyarakat lansia untuk melaksanakan vaksin dikarenakan pemahaman yang kurang terkait pentingnya vaksinasi dan keterbatasan kemampuan untuk menuju ke tempat pelaksanaan vaksinasi.

Proses administrasi dalam pelaksanaan vaksinasi di Kota Pekanbaru secara teknis dilaksanakan berdasarkan kebijakan dari Pemerintah Pusat.

### Bagan 3.2 Proses Administrasi Pelaksanaan Vaksinasi



Sumber: Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/4638/2021

Berdasarkan bagan 3.2 di atas merupakan gambaran proses atau alur administrasi pelaksanaan vaksinasi di Kota Pekanbaru, tidak hanya untuk Kota Pekanbaru saja akan tetapi, proses administrasi tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Kesehatan dan berlaku untuk seluruh daerah baik provinsi, atau kabupaten/kota.

Berdasarkan wawancara dengan pihak Rumah Sakit Daerah Madani Kota Pekanbaru, Ibu Dr. Lusiana menjelaskan bahwa:

*“bahwa alur pelaksanaan vaksinasi dilaksanakan dapat dilakukan melalui website pedulilindungi atau pendaftaran melalui website rumah sakit daerah madani Kota Pekanbaru kemudian vaksinasi dilakukan di Rumah Sakit Madani Kota Pekanbaru, Alur pelaksanaan vaksinasi di Kota Pekanbaru juga dilaksanakan berdasarkan teknis oleh Menteri Kesehatan”.*(wawancara, 27 Januari, 2022).

Hasil dari wawancara di atas bahwa pelaksanaan vaksinasi di Kota Pekanbaru dilaksanakan berdasarkan prosedur yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan melalui website aplikasi pedulilindungi.

#### I. Faktor Penghambat Dalam Implementasi Kebijakan Pelaksanaan Vaksinasi Kepada Masyarakat di Kota Pekanbaru Tahun 2021

Adapun dalam pelaksanaan vaksin masyarakat di Kota Pekanbaru,

Pemerintah Kota Pekanbaru mengalami kendala pada pencapaian target vaksinasi disebabkan keterbatasan dosis vaksinasi yang harus menunggu kebijakan dan alokasi dari Pemerintah Pusat sehingga proses pelaksanaan vaksinasi terganggu. Dengan adanya keterbatasan dosis vaksinasi dari pusat menyebabkan pelaksanaan vaksinasi kepada masyarakat/warga Kota Pekanbaru tertunda.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan implementasi kebijakan pelaksanaan vaksinasi kepada masyarakat di Kota Pekanbaru terhambat dalam pencapaian target vaksinasi kepada masyarakat dan terhambatnya pelaksanaan vaksinasi, yaitu keterbatasan dosis vaksinasi dari pusat dikarenakan harus menunggu proses alokasi dan distribusi dosis vaksin dan keterbatasan tenaga kesehatan di Kota Pekanbaru.

## II. Keterbatasan dosis vaksin dari pusat

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sub Bagian Program, Bapak Riko menjelaskan bahwa:

*“Pelaksanaan program vaksinasi di Kota Pekanbaru menacu pada kebijakan Pemerintah Pusat baik dalam teknis ataupun dosis vaksin itu menunggu dari Pemerintah Pusat, petunjuk teknis juga dari Menteri Kesehatan, intinya segala sesuatu pelaksanaan vaksinasi masih bergantung pada Pemerintah Pusat”.* (wawancara, 27 Januari 2022)

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa untuk kebijakan baik itu terkait pelaksanaan teknis sampai pada kebutuhan dosis vaksin harus menunggu konfirmasi dari Pemerintah Pusat. Proses distribusi yang panjang melalui Pemerintah Pusat tersebut menyebabkan terjadinya keterbatasan jumlah dosis ditingkat daerah Kota Pekanbaru yang mengakibatkan pelaksanaan vaksinasi di Kota Pekanbaru menjadi terhambat.

Berdasarkan wawancara dengan

pihak Satuan Tugas Vaksinasi, Bagian Wakil Koordinator Sekretariat, Bapak Yunaldi menjelaskan bahwa:

*“Peraturan Daerah Kota Pekanbaru yang merujuk pada hal teknis vaksinasi tidak ada, akan tetapi untuk satuan tugas percepatan itu berdasarkan keputusan Walikota Pekanbaru, untuk teknis pelaksanaan dari Pemerintah Pusat begitu juga ketersediaan dosis vaksin juga menunggu dari pusat”.* (wawancara, 27 Januari 2022)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa untuk kebijakan terkait pelaksanaan vaksinasi di Kota Pekanbaru bukan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru, akan tetapi secara teknis berdasarkan kebijakan Pemerintah Pusat dan terkait ketersediaan dosis vaksinasi juga melalui Pemerintah Pusat.

## III. Komunikasi pemerintah

Berdasarkan alur atau proses distribusi dosis vaksinasi hubungan komunikasi antara pihak Pemerintah Kota Pekanbaru, Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru dengan Dinas Kesehatan Provinsi Riau harus terjalin dengan baik dan sinkron. Hubungan komunikasi antara pihak Pemerintah Kota Pekanbaru dan Pemerintah Provinsi Riau, akan berpengaruh pada keberhasilan pelaksanaan vaksinasi di Kota Pekanbaru.

Salah satu permasalahan yang terjadi pada pelaksanaan vaksinasi di Kota Pekanbaru adalah hubungan komunikasi yang tidak baik antara Pemerintah Kota Pekanbaru dan Pemerintah Provinsi Riau terkait data vaksinasi di Kota Pekanbaru sehingga menjadi salah satu faktor keterbatasan dosis vaksinasi di Kota Pekanbaru.

## IV. Pemahaman masyarakat terhadap vaksinasi

Tersebar nya berita-berita di media sosial dan media massa terkait informasi vaksinasi yang simpang siur atau tidak bertanggung jawab menyebabkan masyarakat takut untuk melaksanakan vaksinasi, terutama di Kota Pekanbaru. dipaparkan oleh Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, Bapak Hamdan bahwa :

*“Untuk masalah vaksinasi di Kota Pekanbaru masih banyak masyarakat yang ragu dan takut untuk melaksanakan vaksinasi, dengan alasan takut berefek negatif setelah di vaksin karena melihat berita dan mendapat informasi tidak bertanggung jawab”.*  
([www.halloriau.com](http://www.halloriau.com), 2021)

Berdasarkan kutipan di atas bahwa masih terdapat masyarakat di Kota Pekanbaru yang takut terhadap vaksinasi covid-19 sehingga menjadi salah satu faktor penghambat pelaksanaan kebijakan vaksinasi.

## **PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dari pembahasan di atas, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalam pelaksanaan program vaksinasi masyarakat di Kota Pekanbaru secara teknis dan prosedur pelaksanaan vaksinasi didasarkan pada Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Implementasi kebijakan vaksinasi di Kota Pekanbaru dilaksanakan berdasarkan kebijakan Pemerintah Pusat, tidak didasarkan pada Peraturan Daerah akan tetapi, dalam pelaksanaannya dapat dibentuk Keputusan Walikota Pekanbaru terkait satuan tugas percepatan program vaksinasi di Kota Pekanbaru. Untuk mendukung pelaksanaan percepatan vaksinasi Pemerintah Kota Pekanbaru

melibatkan semua pihak yang ada di Kota Pekanbaru. Implementasi kebijakan vaksinasi masyarakat di Kota Pekanbaru dinilai berhasil dilihat dari tingkat pencapaian target sasaran vaksinasi yang tinggi.

- 2) Adapun faktor penghambat dalam implementasi kebijakan vaksinasi masyarakat di Kota Pekanbaru yaitu keterbatasan dosis vaksinasi dari pusat, komunikasi Pemerintahan Kota Pekanbaru dan pemerintahan Provinsi yang kurang baik yang mengakibatkan validasi data terkait vaksinasi masyarakat di Kota Pekanbaru tidak sinkron, dan pemahaman masyarakat Kota Pekanbaru yang masih takut dengan dampak vaksinasi yang negatif.

### **2. Saran**

Berdasarkan kesimpulan, maka ada beberapa saran yang harus diperhatikan antara lain:

1. Pemerintah Kota Pekanbaru dalam hal ini Dinas Kesehatan, pada pelaksanaan vaksinasi dapat menjadikan acuan perbaikan pada proses pelaksanaan vaksinasi selanjutnya bukan dengan adanya data yang tidak sinkron dan beberapa masalah keterlambatan bahkan penarikan vaksin maka dalam pelaksanaan vaksin Dinas Kesehatan diperlukan kegigihannya dalam menangani pencegahan dan pengawasan wabah ini serta diperlukan Langkah konkrit dan strategis.
2. Disarankan kepada RSD Madani dalam hal ini sebagai penyalur pelaksanaan vaksinasi dapat menjadikan pelaksanaan pada tahap sebelumnya menjadikan sebagai pelajaran dan keseriusan bahwa perlunya data untuk diolah dengan baik walaupun sudah memiliki bagian masing-masing.

3. Disarankan untuk masyarakat di Kota Pekanbaru, agar mentaati peraturan yang telah dibuat oleh Pemerintah Kota Pekanbaru dan Satgas vaksinasi serta peduli terhadap diri sendiri dan melindungi diri pribadi terlebih dahulu agar taat pada peraturan maupun regulasi yang telah dibuat sehingga faktor penghambat yang terjadi dalam implementasi kebijakan vaksinasi dapat diatasi dengan maksimal jika dikomunikasikan dan dikoordinasikan dengan baik. Dan harus lebih memperhatikan lagi terkait petunjuk teknis pelaksanaan vaksinasi yang terdapat pada Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, terkait proses pelaksanaan vaksinasi.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2016). *Dasar Dasar Kebijakan Publik (Edisi Revisi)*. Bandung : Alfabeta.
- Gunawan, A. (2021, Juli 10). *Pekanbaru Targetkan vaksinasi 10.000 orang per hari*. Retrieved Januari 27, 2022 from <https://sumatra.bisnis.com/>:
- Haura, M. A. (2021, Juli 21). *Pasokan Vaksin Untuk Pekanbaru Terhambat Karena Terkendala Persoalan Data*. Retrieved Februari 02, 2022 from [www.riauonline.co.id](http://www.riauonline.co.id):
- Nadia, S. (2021, Januari 15). *Kebijakan pelaksanaan vaksinasi covid-19*. Retrieved Januari 13, 2022 from [persi.or.id](http://persi.or.id)
- Nurlailah. (2021). Implementasi Kebijakan Vaksinasi Covid-19 di Kab. Ogan Komering Ulu. *Jurnal Dinamika, Vol.01*(No.02), 59-68.
- RB M. Akbar T. A. P., D. V. (2021). Implementasi Kebijakan Vaksinasi Covid-19 di Kota Surabaya. *Journal Publicuho, Vol.4*(No.2), 501-510.
- Sampang, R. (2021, Maret 08). *Pentingnya Vaksinasi di Masa Pandemi Covid-19*. Retrieved Maret 08, 2022 from [rsud.sampangkab.go.id](http://rsud.sampangkab.go.id):
- Silalahi, U. (2010). *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT. Rafika Aditama.
- Tachjan.(2006).implementasi kebijakan publik. bandung: asosiasi ilmu politik indonesi (AIPI).
- Wahab, SA. (2015). *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta:Bumi Aksara.
- Widodo, J. (2010). *"Analisis Kebijakan Publik" Konsep dan aplikasi analisis proses kebijakan publik*. Malang: MNC.
- [www.halloriau.com](http://www.halloriau.com). (2021, Desember 08). *Masyarakat Jangan Takut Vaksin, Diskes Pekanbaru: Vaksin Penting Untuk Kekebalan Tubuh*. Retrieved Februari 02, 2022 from <https://www.halloriau.com>